



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/1055/K/411.013/2024
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KEPADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA I

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka II nomor urut 12 Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 154 dan Pasal 155 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, dalam rangka mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi dan mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok pajak, dan/atau sanksinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kepada PT Perkebunan Nusantara I;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/1276/SJ tanggal 13 Maret 2024 perihal Implementasi Pengenaan Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) pada Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit;
 2. Surat Direksi PT. Perkebunan Nusantara I Nomor HQ-DIRUT/X/2024.05.13-24 tanggal 13 Mei 2024 perihal Permohonan Dukungan Pengenaan Tarif 0% (nol persen) atas BPHTB pada Proyek Strategis Nasional Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara I;
 3. Surat Head of Regional Management PT Perkebunan Nusantara I Nomor RH4A-RH/X/2024.09.06-11 tanggal 6 September 2024 perihal Tindak Lanjut Surat Permohonan Dukungan Pengenaan Tarif 0% (nol persen) atas BPHTB pada Proyek Strategis Nasional PT Perkebunan Nusantara I;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA I.
- KESATU : Memberikan Insentif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada PT Perkebunan Nusantara I, atas aset-aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berupa pembebasan seluruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap asetnya yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan ketidaksesuaian data serta informasi atas peralihan aset PT Perkebunan Nusantara I, maka PT Perkebunan Nusantara I wajib membayar seluruh kekurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

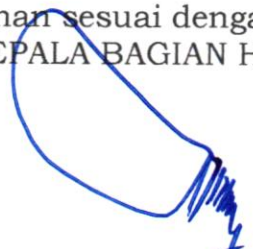
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 12 November 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA I.
- KESATU : Memberikan Insentif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada PT Perkebunan Nusantara I, atas aset-aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berupa pembebasan seluruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap asetnya yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan ketidaksesuaian data serta informasi atas peralihan aset PT Perkebunan Nusantara I, maka PT Perkebunan Nusantara I wajib membayar seluruh kekurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

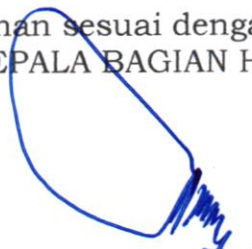
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 12 November 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/1055/K/411.013/2024

TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I

DAFTAR ASET TANAH DAN BANGUNAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I
YANG MENDAPAT PEMBEBASAN SELURUH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN NGANJUK

A. Bidang Sertifikat Hak Yang Masih Berlaku

NO.	UNIT USAHA/ PABRIK	LOKASI		LUAS (M2)	SK HAK	NO. HGU/ HGB/HP/ HPL
		PROVINSI	KABUPATEN			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Juwono Kertosono Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	8.760	SK Kakantah Kab. Nganjuk No 530.221.35.26-02/2005	00005
2.	Juwono Kertosono Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	1.141	SK Kakantah Kab. Nganjuk No 14/HGB/BPN.35.18/ 2010	3
3.	Banaran Kertosono Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	1.900	SK Kakantah No 550.2.35.26/02/2005	00158
4.	Lestari Patianrowo Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	26.205	SK Kakantah Kab. Nganjuk No 550.2.35.26-8	1
5.	Baron Baron Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	7.260	SK Kakantah Kab. Nganjuk No 530.221.35.26.01/2005	00014
6.	Ngangkatan Rejoso Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	16.056	SK Kakanwil BPN No 18- 550.2-35-2007	00001
7.	Jatirejo Loceret Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	70.965	SK Menteri Negara Agraria/Ka BPN No 1262/HGB/BPN/1993	15
8.	Jatirejo Loceret Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	510	SK Kakanwil BPN Prop. Jatim No 062/HGB/35/1993	4
9.	Jatirejo Loceret Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	13.450	SK Menteri Negara Agraria/Ka BPN No 1262/HGB/BPN/1993	8
10.	Jatirejo Loceret Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	4.490	SK Menteri Negara Agraria/Ka BPN No 1262/HGB/BPN/1993	10
11.	Jatirejo Loceret Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	342	SK Kakanwil BPN Prop. Jatim No 062/HGB/35/1993	3

1	2	3	4	5	6	7
12.	Jatirejo Loceret Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	2.485	SK Menteri Agraria/Ka BPN No 1262/HGB/BPN/1993	7
13.	Jatirejo Loceret Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	2.325	SK Menteri Agraria/Ka BPN No 1262/HGB/BPN/1993	12
14.	Patihan Loceret Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	172	SK Kakanwil BPN Prop. Jatim No 062/HGB/35/1993	1
15.	Kwangean Loceret Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	131	SK Kakanwil BPN Prop. Jatim No 062/HGB/35/1993	1
16.	Sombron Loceret Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	102	SK Kakanwil BPN Prop. Jatim No 062/HGB/35/1993	1
17.	Kenep Loceret Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	79	SK Kakanwil BPN Prop. Jatim No 062/HGB/35/1993	1
18.	Pace Wetan Pace Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	56	SK Kakanwil BPN Prop. Jatim No 062/HGB/35/1993	1
19.	Mlandangan Pace Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	127	SK Kakanwil BPN Prop. Jatim No 062/HGB/35/1993	1
20.	Banaran Pace Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	152	SK Kakanwil BPN Prop. Jatim No 062/HGB/35/1993	1
21.	Bodor Pace Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	128	SK Kakanwil BPN Prop. Jatim No 062/HGB/35/1993	1
22.	Joho Pace Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	122	SK Kakanwil BPN Prop. Jatim No 062/HGB/35/1993	1
23.	Gondanglegi Prambon Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	435	SK Kakanwil BPN Prop. Jatim No 062/HGB/35/1993	1
24.	Gondanglegi Prambon Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	878	SK Kakanwil BPN Prop. Jatim No 062/HGB/35/1993	2
25.	Gondanglegi Prambon Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	295	SK Kakanwil BPN Prop. Jatim No 062/HGB/35/1993	3
26.	Singkalanyar Prambon Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	442	SK Kakanwil BPN Prop. Jatim No 326/HGB/35/1995	1
27.	Patranrejo Berbek Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	102	SK Kakanwil BPN Prop. Jatim No 062/HGB/35/1993	1

1	2	3	4	5	6	7
28.	Sumberkepuh Tanjunganom Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	1.765	SK Kakanwil BPN Prop. Jatim No 062/HGB/35/1993	1
29.	Kedungombo Tanjunganom Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	118	SK Kakanwil BPN Prop. Jatim No 062/HGB/35/1993	1
TOTAL				160.993		

B. Bidang Sertifikat Yang Telah Berakhir (Dalam Proses Perpanjangan/Pembaruan Hak)

NO.	UNIT USAHA/ PABRIK	LOKASI		LUAS (Ha)	SK HAK	NO. HGU/ HGB/ HP/ HPL	TANGGAL BERLAKU/ BERAKHIR	STATUS
		PROVINSI	KABUPATEN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jatirejo Loceret Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	1.155	SK Kakanwil BPN Prop. Jatim No 062/HGB/35/ 1993	5	26/01/ 2024	Proses Perpanja- ngan
2.	Jatirejo Loceret Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	577	SK Kakanwil BPN Prop. Jatim No 062/HGB/35/ 1993	2	26/01/ 2024	Proses Perpanja- ngan
3.	Jatirejo Loceret Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	2.300	SK Menteri Negara Agraria/Ka BPN No 1262/HGB/ BPN/1993	9	26/01/ 2024	Proses Perpanja- ngan
4.	Jatirejo Loceret Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	1.860	SK Kakanwil BPN Prop. Jatim No 062/HGB/35/ 1993	1	26/01/ 2024	Proses Perpanja- ngan
5.	Jatirejo Loceret Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	2.209	SK Menteri Negara Agraria/Ka BPN No 1262/HGB/ BPN/1993	13	26/01/ 2024	Proses Perpanja- ngan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Jatirejo Loceret Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	4.100	SK Menteri Negara Agraria/Ka BPN No 1262/HGB/ BPN/1993	14	26/01/ 2024	Proses Perpanja- ngan
7.	Jatirejo Loceret Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	1.850	SK Kakanwil BPN Prop. Jatim No 062/HGB/35/ 1993	6	26/01/ 2024	Proses Perpanja- ngan
8.	Jatirejo Loceret Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	2.230	SK Menteri Negara Agraria/Ka BPN No 1262/HGB/ BPN/1993	11	26/01/ 2024	Proses Perpanja- ngan
9.	Jatirejo Loceret Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	2.230	SK Menteri Negara Agraria/Ka BPN No 1262/HGB/ BPN/1993	11	26/01/ 2024	Proses Perpanja- ngan
10.	Sekaran Loceret Nganjuk	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	157	SK Kakanwil BPN Prop. Jatim No 062/HGB/35/ 1993	1	26/01/ 2024	Proses Perpanja- ngan
			TOTAL	16.438				

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001